

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2020 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen/lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, satuan kerja atau unit kerja didalamnya, wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dengan mempergunakan tolak ukur perjanjian kinerja masing-masing jabatan struktural.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa datang.

Malili, Februari 2021  
An. Kepala Bapelitbangda,

Drs. DOHRI AS'ARI  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip. 19670912-198811 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	2
1.3. Isu Strategis .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis .....	6
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
3.2. Realisasi Anggaran .....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. ISU-ISU STRATEGIS

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Tahun 2020 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

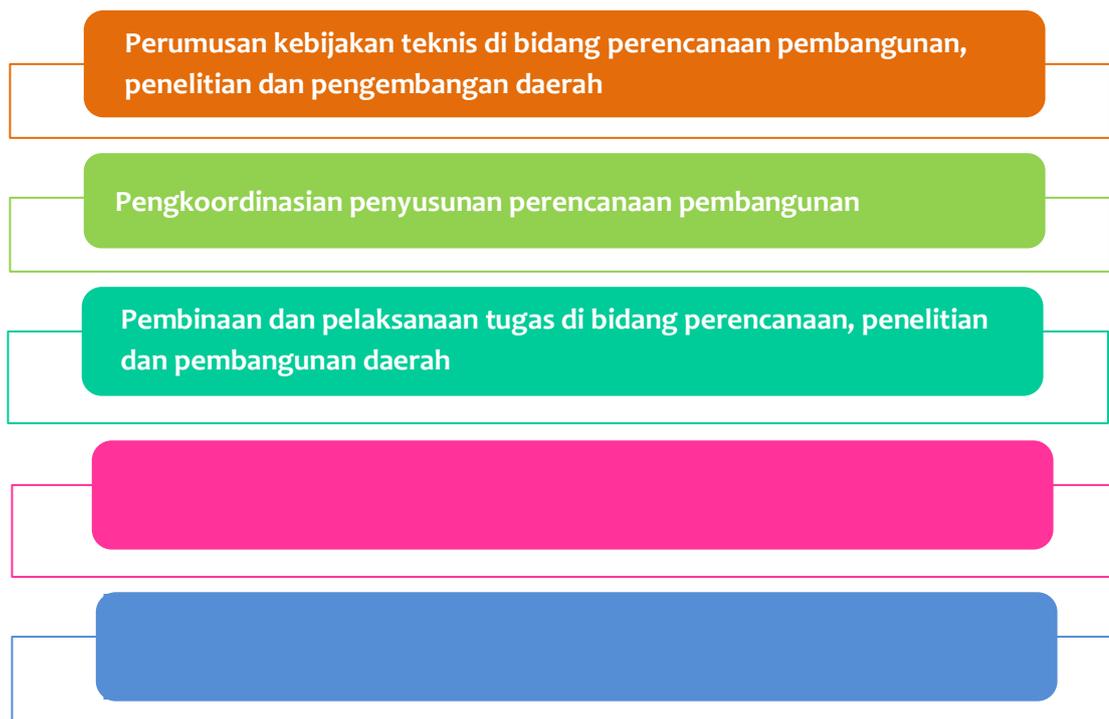
Laporan kinerja Tahun 2020 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatanyang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang

harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun 2020.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :



Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah

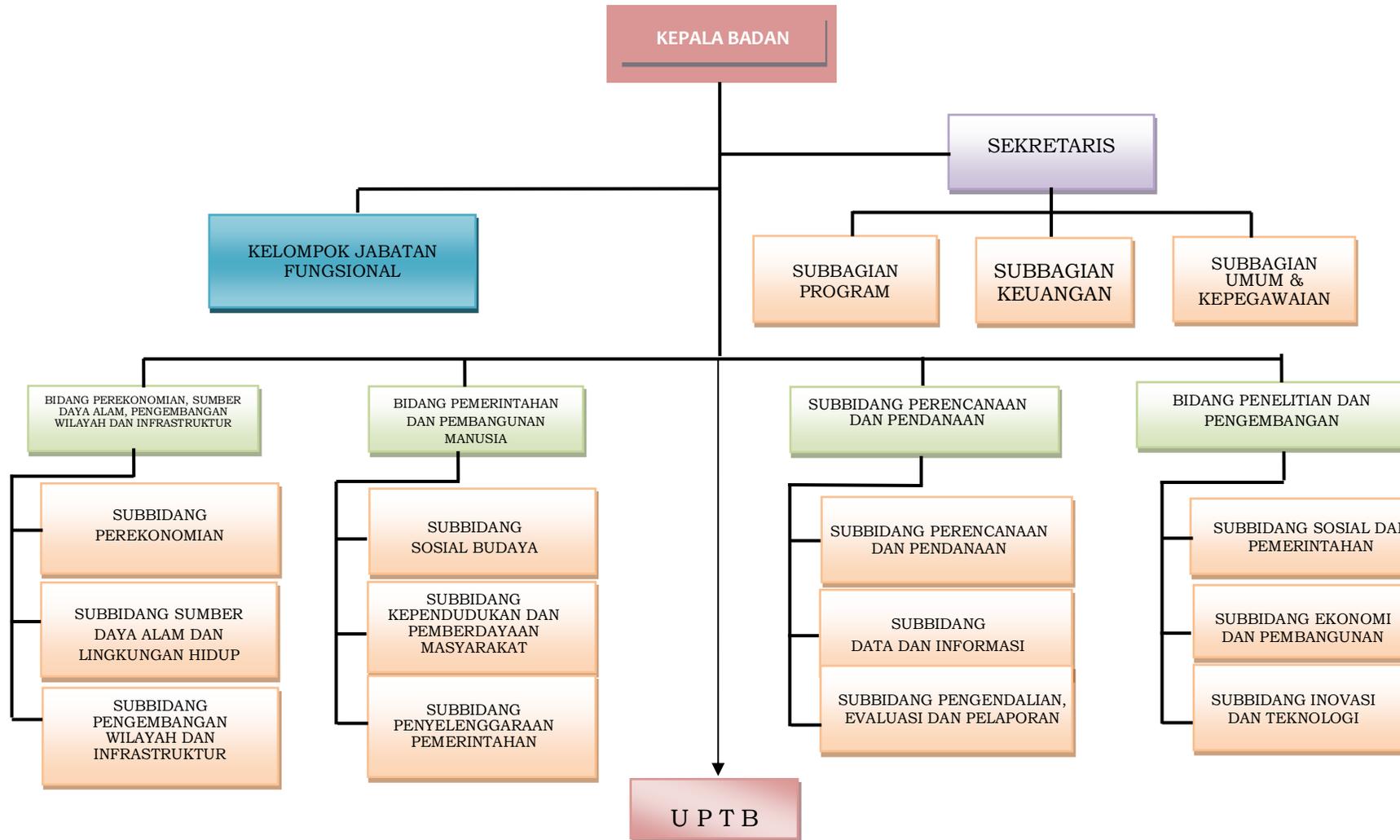
Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - Subbagian Program;
  - Subbagian Keuangan; dan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur, terdiri atas:
  - Subbidang Perekonomian;
  - Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  - Subbidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
  - Subbidang Sosial Budaya;
  - Subbidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - Subbidang Data dan Informasi; dan
  - Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- 
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
    - Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
    - Subbidang Sosial dan Pemerintahan; dan
    - Subbidang Inovasi dan Teknologi.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor :39 Tahun 2019 struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi Bapelitbangda, Kab. Luwu Timur

### 1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur, maka dapat diidentifikasi, beberapa hal sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan perangkat lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

# BAB II

## PERANCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS
- 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS



Encana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur

disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), yang selanjutnya Rencana strategis tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Menumbuhkan inovasi daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah;

4. Terciptanya penerapan inoevasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah.

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**(Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur**

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	94,81	97,25	97,97	98,73	99,32
2	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD (%)	42,86	43,87	44,43	44,54	44,77
3	Nilai SAKIP	45,54	55,86	58,28	62,35	70,01
4	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	33,33	33,33	38,46	38,46	41,03
5	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang/inovasi	10,00	10,00	16,67	25,00	33,33

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) tahun 2020 tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) melaksanakan 13 Program dan 48 Kegiatan dan di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	99,32
2.	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD (%)	44,77
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	70,01
4.	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	41,03
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang/inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang/inovasi (%)	33,33

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 686,413,000	APBD Kabupaten
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 83,380,000	APBD Kabupaten
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 80,180,000	APBD Kabupaten
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 7,390,000	APBD Kabupaten
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp 4,320,000	APBD Kabupaten
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp 65,153,000	APBD Kabupaten
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 775,556,000	APBD Kabupaten
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 289,748,000	APBD Kabupaten
9	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp 254,885,000	APBD Kabupaten
10	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp 323,822,000	APBD Kabupaten
11	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Rp 107,276,000	APBD Kabupaten
12	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Rp 672,494,000	APBD Kabupaten
13	Program Sistem Inovasi Daerah	Rp 50,997,000	APBD Kabupaten

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

#### 1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

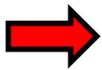
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Berikut disajikan capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2020 :



**Sasaran 1 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

**Tabel 3.2**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	99,32	97,61	98,28

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

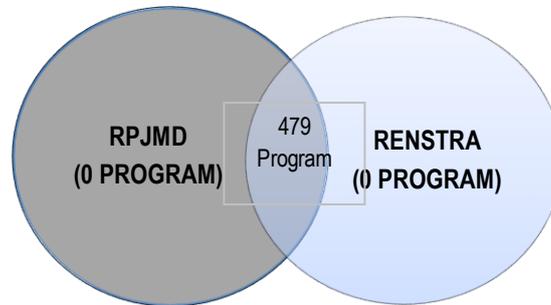
$$\text{Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah} = \frac{K1 + K2 + K3 + K4}{4}$$

**1). Persentase Keselarasan Program Renstra terhadap RPJMD (K1)**

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase keselarasan program Renstra terhadap RPJMD} &= \frac{\text{Jumlah program Renstra tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\% \\ &= \frac{479}{479} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RPJMD tahun 2020 digunakan dalam Renstra perangkat daerah tahun 2020 (konsisten).



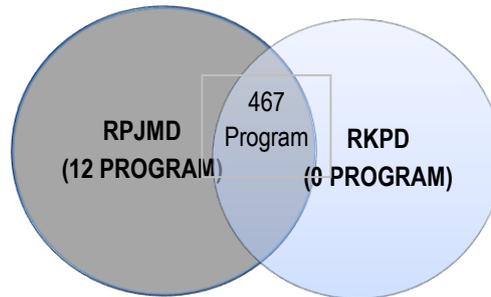
Gambar 02. Keselarasan Program Renstra terhadap RPJMD

## 2). Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD (K2)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \frac{\text{-----}}{\text{-----}} & \times 100 \% \\
 \text{RKPD terhadap} & & & \text{Jumlah program RPJMD yang harus} \\
 \text{RPJMD} & & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & & \\
 & = & \frac{467}{479} & \times 100 \% \\
 & = & 97,29 \% & 
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa Ada 12 program pada RPJMD yang tidak digunakan dalam RKPD Tahun 2020, hal ini berdasarkan analisa kebutuhan sesuai tema prioritas pembangunan pada Tahun 2020 dan hasil cascading penyelarasan sasaran, tujuan, dan program.



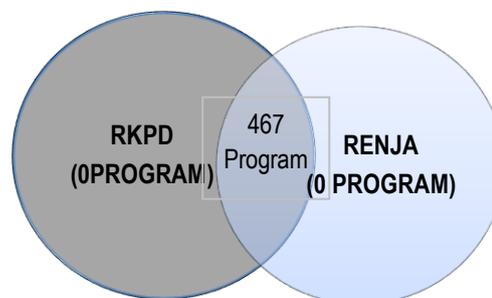
Gambar 03. Keselarasan antara program RKPD terhadap RPJMD

### 3). Persentase Keselarasan Program Renja terhadap RKPD (K3)

Indikator ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah program Renja tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{Renja terhadap RKPD} & & \text{Jumlah program RKPD yang harus} \\
 & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & = & \frac{467}{467} \times 100 \% \\
 & = & 100 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa semua program pada RKPD tahun 2020 digunakan dalam Renja perangkat daerah tahun 2020 (konsisten).



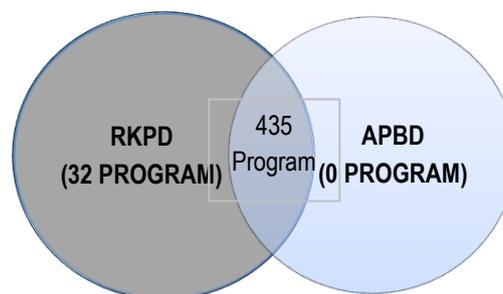
Gambar 04. Keselarasan program Renja terhadap RKPD

#### 4). Persentase Keselarasan Program APBD terhadap RKP (K4)

Indikator Ini di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & \text{Jumlah program APBD tahun berkenaan} \\
 \text{keselarasan program} & = & \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah program RKP yang harus}} & \times 100 \% \\
 \text{APBD terhadap RKP} & & & \text{dilaksanakan tahun berkenaan} \\
 & & & \\
 & = & \frac{435}{467} & \times 100 \% \\
 & = & 93,15 \% & 
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hitungan tersebut dapat digambarkan bahwa Ada 32 program pada RKP tahun 2020 yang tidak digunakan dalam APBD tahun 2020, hal ini berdasarkan analisa kebutuhan sesuai tema prioritas pembangunan pada Tahun 2020 dan hasil cascading penyelarasan program.



Gambar 05. Keselarasan program Renja terhadap RKP

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & & 100 \% + 97,49 \% + 100 \% + 93,15 \% \\
 \text{keselarasan antar} & = & \frac{\text{-----}}{4} & \\
 \text{dokumen} & & & \\
 \text{perencanaan} & & & \\
 \text{pembangunan} & & & \\
 \text{daerah} & = & 97,61 \% & 
 \end{aligned}$$

Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat Tinggi**.

## b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3  
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	97,61	97,66

Dari tabel tersebut diketahui bahwa secara umum indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berjalan sangat baik setiap tahunnya karena adanya pengendalian evaluasi penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelarasan sasaran, tujuan, dan program.

## c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra Sasaran 1

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2020)	Realisasi 2020	% Capaian
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	99.32	97,61	98,28

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai tahun 2020 masih sangat baik dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

#### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah antara lain :

- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar perangkat daerah;
- Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning dan E-Monev, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain :

- Adanya perubahan target pendapatan, yang berdampak pada beberapa program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan (efisiensi belanja).
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- Beberapa struktur organisasi perangkat daerah pemerintah daerah Kab. Luwu Timur tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur dan nomenklatur kelembagaan dan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan;
- Adanya beberapa jabatan struktural yang masih kosong, khususnya jabatan kasubag perencanaan, sehingga kesulitan pada saat asistensi dan penyusunan dokumen perencanaan.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian target sasaran tersebut antara lain :

- Memaksimalkan realisasi pendapat sesuai target yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai target perencanaan;
- Standarisasi program dan kegiatan serta indikatornya melalui review usulan rencana kerja perangkat daerah;
- Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan;

- Memaksimalkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam hal menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi dalam proses penganggaran;
- Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev secara akurat dan berkesinambungan;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- Mengusulkan ke pimpinan untuk segera mengisi beberapa jabatan struktural yang masih kosong, khususnya jabatan kasubag perencanaan agar penyusunan serta pengendalian dokumen perencanaan di perangkat daerah dapat berjalan maksimal.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sistem informasi berbasis E-planning, E-Budgeting dan E-Monev merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kinerja ditengah terbatasnya jumlah pegawai.

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah, antara lain :

➤ Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diukur dengan menggunakan indikator persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan. Jumlah dokumen yang ditetapkan sesuai target yaitu sebanyak 7 dokumen (100%). Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi anggaran sebesar Rp 721.378.500,- atau 93,01% dari pagu anggaran Rp 775.556.000,-, merupakan **kategori sangat tinggi**. Dokumen-dokumen yang dihasilkan pada tahun 2020 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Dokumen	Tanggal Penetapan	Ket
1	RKPD Tahun 2021	23 Juli 2020	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2020
2	RKPD Perubahan Tahun 2020	18 Agustus 2020	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020
3	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021	19 Agustus 2020	Nota kesepakatan antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 188.342 / 05 / PEM-LT / VIII / 2020 dan Nomor 188.342/ 05/ DPRD-LT/ VIII/ 2020
4	Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2020	31 Agustus 2020	Nota kesepakatan antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 188.342/07/PEM-LT/ VIII/ 2020 dan Nomor 188.342/ 07/ DPRD-LT/ VIII/ 2020
5	Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021	19 Agustus 2020	nota kesepakatan antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 188.342/06/PEM-LT/ VIII/2020 dan Nomor 188.342/ 6/ DPRD-LT/VIII/ 2020
6	Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2020	31 Agustus 2020	nota kesepakatan antara Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 188.342/08/PEM-LT/VIII/ 2019 dan Nomor 188.342/ 08/ DPRD-LT/ VIII/ 2019
7	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019	27 Maret 2020	Rekomendasi DPRD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 direalisasikan melalui 5 (lima) kegiatan. Adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan  
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan</b>	%	100	100	100.00	
1	Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen teknokratik RPJMD yang disusun sesuai peraturan	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
2	Penyusunan Rancangan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP yang ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah dokumen musrenbang yang dihasilkan	Dokumen	5	5	100.00	Mencapai Target
4	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ bupati yang disusun	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
5	Penyusunan Rancangan KUA Dan PPAS	Jumlah dokumen nota kesepahaman KUA dan PPAS yang di susun	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target
6	Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan	Jumlah dokumen usulan dana alokasi khusus	Dokumen	4	4	100.00	Mencapai Target

➤ Program Pengendalian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Program ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pengendalian dan evaluasi kebijakan program pembangunan daerah. Capaian kinerja perangkat daerah tahun 2020 sebesar 100 %. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi anggaran sebesar Rp 106.260.900,- atau 99,05% dari pagu anggaran Rp 107.276.000,- merupakan **kategori sangat tinggi**.

Program Pengendalian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2020 direalisasikan melalui 2 (dua)

kegiatan. Adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Pengendalian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	
1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
2	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan aturan	Dokumen	2	2	100.00	Mencapai Target

➤ **Program Pengembangan Data/Informasi**

Program ini diukur dengan menggunakan indikator persentase data/informasi pembangunan daerah yang termanfaatkan. Data dan informasi yang dihasilkan antara lain dokumen sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), aplikasi e-planning dan aplikasi E-Monev. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 61.902.900,- atau 95,01% dari pagu anggaran Rp 65.153.000,- merupakan **kategori sangat tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 2 (dua) kegiatan. Adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Pengembangan Data/Informasi**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data dan informasi pembangunan daerah yang termanfaatkan	%	100	100	100.00	
1	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	jumlah aplikasi SIPD yang menyajikan data pokok dan informasi	Aplikasi	1	1	100.00	Mencapai Target
2	Penyusunan, Updating, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target



**Sasaran 2 : Terwujudnya perencanaan yang partisipatif**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2020	Realisasi	%
1	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD	%	44,77	38,75	86,55

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD} = \frac{\text{Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD}}{\text{Jumlah usulan musrenbang RKPD}} \\
 &= \frac{322}{831} \\
 &= 38,75\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 38,75% atau sebesar 86,55% dari target kinerja tahun 2020 yaitu 44,77%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori tinggi**. Berikut disajikan hasil usulan musrenbang RKPD berdasarkan perangkat daerah :

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Usulan Musrenbang Berdasarkan Perangkat Daerah**

No.	Nama OPD	Jumlah Usulan Musrenbang	Jumlah Usulan Yang Sesuai (Hasil Investigasi)	Jumlah Usulan yang Diakomodir Dalam RKPD	%
1	Dinas PUPR	317	256	178	56.15
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	238	163	54	22.69
3	Dinas Pertanian	115	90	35	30.43
4	Dinas Pendidikan	58	32	25	43.10
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	47	18	9	19.15
6	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	5	3	33.33
7	DinasS Kelautan, Perikanan dan Pangan	11	9	4	36.36
8	Dinas Kesehatan	34	24	14	41.18
9	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0
10	BPBD	1	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>831</b>	<b>597</b>	<b>322</b>	<b>38.75</b>

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.10**  
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD	%	38,75	35,14	32,75

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD berjalan dengan baik setiap tahunnya.

**c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)**

**Tabel 3.11**  
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2020)	Realisasi 2020	%
1	Terwujudnya perencanaan yang partisipatif	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD (%)	%	44,77	38,75	86,55

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen RKPD sampai tahun 2020 semakin baik, dan diharapkan kondisi tersebut dapat terjaga sehingga pada tahun akhir renstra pencapaian indikator tersebut dapat terealisasi maksimal sesuai harapan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
- Penggunaan sistem informasi berbasis E-Musrenbang dan E-Pokir, sehingga tahapan perencanaan, penganggaran dan pengawasan dapat berjalan maksimal.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

- Keterbatasan anggaran sehingga beberapa usulan tidak dapat diakomodir;
- Mayoritas usulan musrenbang merupakan pembangunan fisik (konstruksi) seperti pengaspalan jalan, pembangunan/perbaikan drainase, pembentukan/peningkatan jalan usaha tani/jalan produksi, pembangunan jembatan, Pembangunan jides, pembangunan bronjong/talud/proteksi, pembangunan RKB, Pembangunan pustu dan pembangunan poskesdes;
- Beberapa usulan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah Kab. Luwu Timur;
- Usulan tidak masuk prioritas pembangunan;
- Tidak dilengkapi dengan data-data pendukung yang sesuai.

Alternatif solusi yang dilakukan pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

- Menyampaikan lebih awal kegiatan prioritas pembangunan daerah kepada masing-masing kecamatan (rancangan awal RKPD dan Renja perangkat daerah);
- Masing-masing kecamatan mengidentifikasi usulan yang betul-betul prioritas dan sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Renja perangkat daerah;
- Mengurutkan usulan berdasarkan prioritasnya.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sistem informasi berbasis E-Musrenbang dan E-planning merupakan strategi dalam pencapaian sasaran kinerja.

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

➤ **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Program ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pemanfaatan laporan koordinasi/dokumen perencanaan bidang ekonomi. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 282.653.000,- atau 97,55% dari pagu anggaran Rp 289.748.000,-. Merupakan **kategori sangat tinggi**. Program ini dilaksanakan dalam rangka monitoring, evaluasi, koordinasi dan asistensi perangkat daerah lini koordinasi sektor ekonomi antara lain :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Bidang Pariwisata)
- g. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
- h. Dinas Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terealisasi melalui 6 (enam) kegiatan. Adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Persentase pemanfaatan laporan koordinasi/ dokumen perencanaan bidang ekonomi</b>	%	100	100	100.00	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
2	Fasilitasi Rural Empowerment and Agriculture Development - Scalling Up Initiative (READ-SI)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi READ-SI yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
3	Koordinasi Investasi Promosi	Jumlah Laporan Keikutsertaan dalam Event Promosi (Pameran/Ekspo/Eks ebisi) yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
4	Koordinasi Pengembangan Produk Komoditi Unggulan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Produk Komoditi Unggulan Daerah yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
5	Penyusunan Regulasi Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah regulasi pembangunan ekonomi daerah yang disusun	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target
6	Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan DBH Pajak Rokok yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target

➤ **Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya**

Program ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pemanfaatan laporan koordinasi/dokumen perencanaan bidang sosial

budaya. Capaian kinerja program ini sebesar 100%, Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 233.678.700,- atau 91,68 % dari pagu anggaran Rp 254.885.000,-. Merupakan **kategori sangat tinggi**. Program ini dilaksanakan dalam rangka monitoring, evaluasi, koordinasi dan asistensi perangkat daerah lini koordinasi sektor pembangunan sosial budaya antara lain :

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Kesehatan
- c. RSUD I Lagaligo
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Bidang Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olah Raga)
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- j. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- k. Inspektorat
- l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- m. Sekretariat Dewan
- n. Sekretariat Daerah
- o. Kecamatan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya direalisasikan melalui 5 (lima) kegiatan. Adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.13  
Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan  
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Persentase pemanfaatan laporan koordinasi/dokumen perencanaan bidang sosial budaya</b>	%	100	100	100.00	
1	Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah laporan kinerja TPKD dan dokumen pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	Laporan	2	2	100.00	Mencapai Target
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Jumlah laporan perencanaan bidang sosial dan budaya	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
3	Penyelenggaraan Musrenbang Anak	Laporan musrenbang anak yang dibuat	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
4	Koordinasi Forum Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah laporan forum pembinaan kabupaten sehat yang dihasil	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
5	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah laporan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang dihasilkan	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target

➤ Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

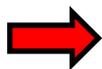
Program ini diukur melalui indikator persentase pemanfaatan dokumen tata ruang untuk perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 622.598.000,- atau 92,58% dari pagu anggaran Rp 672.494.000,. Program ini dilaksanakan dalam rangka monitoring, evaluasi, koordinasi dan asistensi perangkat daerah lini koordinasi sektor Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah antara lain :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika

Program ini terealisasi melalui 5 (lima) kegiatan, adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table di bawah :

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>Persentase pemanfaatan dokumen tata ruang untuk perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100.00</b>	
1	Koordinasi Penanganan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Jumlah laporan hasil penanganan air minum dan sanitasi masyarakat	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
2	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah laporan pengembangan infrastruktur dan wilayah yang	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
3	Koordinasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	Jumlah laporan kawasan perdesaan prioritas nasional yang didampingi	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
4	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur dan wilayah	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target
5	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen rencana tata ruang wilayah yang disusun	Dokumen	1	1	100.00	Mencapai Target



**Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

**Tabel 3.15**  
**Analisis pencapaian kinerja sasaran 3**

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	70,01	66,83	95,46

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah adalah menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Lembar Kerja Evaluasi (LKE)**

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	10
5	Capaian Kinerja	20
<b>Total</b>		<b>100</b>

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan parameter sebagai berikut :

**3.17**  
**Parameter Evaluasi Akuntabilitas**

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, bekerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30 – 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2019 terhadap 5 komponen tersebut dengan capaian kinerja 66,83 (**B**) dengan kategori interpretasi **Baik**. Berikut disajikan hasil evaluasi per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.18

## Tabulasi Nilai SAKIP Bapelitbangda tahun 2019

No	Komponen	Bobot	2019
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,56
2	Pengukuran Kinerja	25,00	15,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,15
4	Evaluasi Kinerja Internal	10,00	3,89
5	Capaian Kinerja	20,00	13,23
<b>Jumlah Hasil Evaluasi</b>		<b>100,00</b>	<b>66,83</b>

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.19

## Perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	66,83	83,61	41,40

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan opini inspektorat Tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2018 dengan capaian kinerja 83,61 (BB) kategori interpretasi sangat baik.

### c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra**

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2020)	Realisasi 2020	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	70,01	66,83	95,46

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator Nilai SAKIP yang menjadi tolok ukur utama dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2020 belum mencapai target akhir Renstra. Hal ini tentunya belum sejalan dengan target penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kab Luwu Timur untuk mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai BB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Diharapkan ditahun mendatang realisasi indicator ini dapat mencapai target.

### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Dukungan Pemerintah daerah dalam mewujudkan hasil evaluasi dengan nilai B oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui pelatihan dan pendampingan (studi banding dan coaching clinic);
- Telah menggunakan e-planning dalam perencanaan
- Telah mereviu dokumen Renstra tahun 2016 – 2021
- Renstra telah memuat indicator tujuan, indicator sasaran dan menyajikan IKU
- Telah memiliki dokumen perencanaan Kinerja Tahunan tahun 2019
- Telah memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Telah memiliki dokumen Rencana Aksi atas kinerja tahun 2019
- Telah memiliki perjanjian kinerja secara berjenjang

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Belum ada ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
- b. Pengukuran kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya berjalan, masih berupa pemenuhan dokumen;
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;
- d. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai, belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya;

Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan;
- e. Langkah penguatan tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari tim Kemenpan-RB;
- f. Membuat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja untuk dijadikan dasar penilaian terhadap staf.
- g. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV ke atas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;
- h. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Peningkatan kualitas sumberdaya pengelola SAKIP perangkat daerah dan pemanfaatan Sistem E-Sakip akan memberikan manfaat yang besar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terwujudnya perencanaan yang partisipatif antara lain :

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diukur melalui indikator persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Capaian kinerjanya sebesar 100 %. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 622.593.901,- atau 90,70% dari pagu anggaran Rp 686.413.000,-, merupakan **kategori tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 13 (tiga belas) kegiatan. Adapun nama kegiatan, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table di bawah :

**Tabel 3.21**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>95</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	Surat	1200	1183	98,58	Tidak Mencapai Target
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Rekening	36	36	100.00	Mencapai Target
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan kantor	Jenis	15	15	100.00	Mencapai Target
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor Yang diperbaiki	Unit	24	24	100.00	Mencapai Target
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	30	30	100.00	Mencapai Target
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	3	100.00	Mencapai Target
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam-macam Komponen instalasi listrik dan alat listrik	Jenis	8	8	100.00	Mencapai Target

8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Dos	910	860	94,51	Tidak Mencapai Target
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran lokal, regional, nasional yang disiapkan sebagai bahan bacaan	Eksamplar	60	60	100	Mencapai Target
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Jenis	1	1	100.00	Mencapai Target
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	79	13	92,41	Tidak Mencapai Target
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dan Keamanan yang terbayarkan	Orang	13	13	100.00	Mencapai Target
13	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan	Kali	225	77	34,22	Tidak Mencapai Target

➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diukur melalui indikator persentase rata-rata sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik. Capaian kinerjanya sebesar 100%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 68.762.960,- atau 82,47% dari pagu anggaran Rp 83.380.000,-. merupakan **kategori tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 2 (dua) kegiatan, adapun nama program, pagu anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.22**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja peningkatan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100.00	

1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	1	100.00	Mencapai Target
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	9	9	100.00	Mencapai Target

➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diukur melalui indikator persentase aparatur yang yang ditingkatkan kapasitasnya. Jumlah aparatur lingkup Bapelitbangda yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan bimtek/diklat/workshop/seminar sebanyak 8 orang dari total 30 pegawai (26,67%).. Nilai capaian kinerja program ini merupakan kategori rendah. Salah satu penyebab rendahnya realisasi kinerja pada program ini yaitu adanya pandemic covid-19 pada tahun 2020, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengurangi kegiatan yang menjadi wadah berkumpulnya orang yang dapat memudahkan penyebaran virus. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 77.886.000,- atau 97,14% dari pagu anggaran Rp 80.180.000,-. merupakan kategori sangat tinggi. Program ini direalisasikan melalui 1 (satu) kegiatan, dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	%	60	26,67	44,45	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/workshop /seminar	Orang	8	8	100.00	Mencapai Target

Tabel 3.24

## Daftar nama ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan TA.2020

No.	Nama	Nama Diklat	Tanggal	Ket.
1.	Drs. Dohri As'ari	Bimtek pendalaman Permendagri Nomor 64 Tahun 2020	05 – 09 Oktober 2020	
2.	Ainuddin, S.ST., M.Si	Sosialisasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	23 – 25 Februari 2020	
3.	Ragusman LW., S.Kom	Sosialisasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	23 – 25 Februari 2020	
4.	Muhammad Reza, SE	Sosialisasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	23 – 25 Februari 2020	
5.	Darnawati, SP., MP	Bimtek Penyusuna Peta Proses Bisnis	03 – 06 Maret 2020	
6.	M. Mujahid Shaleh, ST	Pelatihan Analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan	10 – 14 Februari 2020	
7.	Mustamin, SE	Workshop pengembangan inisiatif transfer anggaran berbasis ekologis (TAKE)	04 – 06 Februari 2020	
8.	Sri Rizki, S.Hut	Pelatihan Ekonomi Pembangunan (Economic Development Training)	15 – 16 ebruari 2020	

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini diukur melalui indikator persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat. Capaian kinerjanya sebesar 100 %. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 6.525.500,- atau 88.30% dari pagu anggaran Rp 7.390.000,- merupakan **kategori tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 2 (dua) kegiatan, yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.25**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

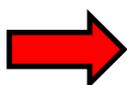
No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	
1	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	Dok	1	1	100.00	Mencapai Target
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan dan akhir tahun yang dibuat	Dok	2	2	100.00	Mencapai Target

➤ Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD,

Program ini diukur melalui indikator persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu. Capaian kerjanya sebesar 100 %. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi keuangan sebesar Rp 3.711.300,- atau 85,91% dari pagu anggaran Rp 4.320.000,- merupakan **kategori tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :

**Tabel 3.26**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan**  
**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	%	95	95	100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dok	6	6	100.00	Mencapai Target



**Sasaran 4 : Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

**Tabel 3.27**  
**Analisis pencapaian kinerja sasaran 4**

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%
1	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	%	41,03	48,71	118,71

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} & & \text{Jumlah perangkat daerah yang} \\
 \text{perangkat daerah} & & \text{Menghasilkan inovasi daerah} \\
 \text{yang menghasilkan} & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 \text{inovasi daerah} & & \text{Jumlah perangkat daerah} \\
 & & 19 \\
 & = & \text{-----} \times 100 \% \\
 & & 39 \\
 & = & 48,71 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 48,71% dengan persentase capaian 118,71% dari target kinerja 41,03%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan kategori sangat berhasil. Berikut disajikan perangkat daerah dan inovasi yang dihasilkan antara lain :

**Tabel 3.28**  
**Jumlah Perangkat Daerah dan Inovasi Yang Dihasilkan Tahun 2020**

No.	Nama SKPD	JUDUL INOVASI	NAMA INOVATOR
1	Dinas PUPR	SIJAMATA (Sistem Informasi Jalan Jembatan)	Sahrir Sahrudin, ST.,M.Si
	Dinas PUPR	Optimalisasi Pelayanan Pemberian Air Daerah Irigasi Kalaena	Muhammad Saleh, ST
	Dinas PUPR	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Kecamatan Malili	Tintin Sumarni, ST
	Dinas PUPR	Data Itu Mahal Tapi Lebih Mahal Tanpa Data	Sugiyono, ST
	Dinas PUPR	Legalitas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Hadi Sugianto,ST
2	BKPSDM	LA CUTI PNS (Layanan Cuti PNS)	Eksa Putra Kusumayani
	BKPSDM	SIBAPER (Sistem Informasi Bank Data Perencanaan)	Martini, SE
	BKPSDM	SI JEMPUT PENSIUN (Sistem Pelayanan Jemput Dokumen Pensiun)	Asmawati, S.AP

	BKPSDM	Penataan Arsip Melalui Si-Surat (Sistem Informasi Surat)	SABIA, SE
3	BPMPD	SI KODE ( Sekolah Desa )Kecamatan Malili	Basondeng Abbas, S.Sos
4	BPBD	Database Daerah Rawan Bencana Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur	Herawaty Kamaruddin, SE
	BPBD	Penataan Dokumen Pasca Bencana Berbasis Data Digital	Denny Franklin De'e, ST
5	Dinas PARBUDMUDORA	Kreasi PEMUJA Luwu Timur ( Kreasi Pemuda dan Remaja Luwu Timur)	BAKARA, S.Pd
6	RSUD I Laga Ligo	SUSTER I LAGALIGO ( Sistem Rumah Sakit Terintegrasi I Lagaligo)	Dr. Benny
7	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian	E-ARSIP DISTRANSNAKERIN	Erfina, SE
8	SATPOL PP DAMKAR	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Bahaya Kebakaran dan cara Penanggulangannya	Paulus Prianto Endoleku, S.Sos
	SATPOL PP DAMKAR	Pengoptimalan Response Time Rate Melalui Standar Operasional Prosedur Yang Tepat Guna	Hasniar, S.Sos
	SATPOL PP DAMKAR	Penyebarluasan Informasi Nomor On Call Atau Nomor Emergency Pemadam Kebakaran	Irawati, SH
	SATPOL PP DAMKAR	Satlakar To Quick Response (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran Menuju Respon Cepat)	Saiful Sudding, SH
	SATPOL PP DAMKAR	Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran untuk Meminimalisir dan Mencegah Kebakaran di Kecamatan Towuti	Kasim, S.Sos
9	INSPEKTORAT	ROADMAP 2 SIMHP (Sistem Informasih Manajemen Hasil Pemeriksaan)	Nurmiyati, SP
10	KESBANGPOL	SI LUNA MAIN SOSMED (Sebaran Informasi Lagu-Lagu Nasional Melalui Infografis Dan Sosial Media) Di Kabupaten Luwu Timur	Hermawati, SE

11	Sekretariat Daerah	JALAN - JALAN SEHAT (Alat Kontrol Perjalanan Dinas) pada Sekretariat Daerah	Cendana Wangi, SE
	Sekretariat Daerah	Efektifitas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Serli Tangmallun, S.H
12	Dinas Pertanian	Pengdaan Dan Pelayanan Benih Padi	I Komang Darma,SP
13	Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan	Peningkatan Penjualan Benih Ikan	Andi Baso Mattoreang
14	Kecamatan Malili	Penataan Data Pegawai Digital Pada Kantor Camat Malili	Harianty Ibrahim Karim.SE
	Kecamatan Malili	Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Malili (SIAP'MI)	Muhammad Ainul Haeruddin, S.STP
	Kelurahan Malili	MALILI SADAR PBB	Ekawati, S.AN
	Kelurahan Malili	Sampah Tukar Rupiah	Notmayanti. A. Md
15	Kecamatan Wasuponda	Si-SIGAB ( Sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala)	Masnayanti, SE
16	Kecamatan Tomoni Timur	Mobil Jenazah Tomoni Timur	Dedy Sutaryo,S.Sos
17	Kecamatan Tomoni	Arsip Dinamis Sulit Diperoleh Jika Dibutuhkan	Sapriillah,S.M
18	Kecamatan Wotu	IMB ON CALL	Isdamayanti Basri, S. Pd.SD
19	Kelurahan Magani	Pelayanan Prima Melalui Smartphone di Kelurahan Magani	Mulyani, SE

## b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.29**  
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah (%)	%	48,71	23,08	7,69

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah pada tahun 2020 sebanyak 19 perangkat daerah (48,71%), dengan capaian kinerja **sangat tinggi** mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 yaitu 23,08% dan tahun 2018 yaitu 7,69%. Berikut disajikan inovasi perangkat daerah tahun 2019 antara lain :

### c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)

Tabel 3.30  
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2020)	Realisasi 2020	%
1	Terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah	%	41.03	48,71	118,71

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah pada tahun 2020 memberikan hasil yang sangat memuaskan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak baik perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan pihak swasta dalam upaya memaksimalkan target sasaran tersebut sampai akhir renstra.

### d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

- a. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait inovasi daerah;
- b. Adanya Peraturan yang mengharuskan setiap Instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal satu inovasi “one agency one innovation” pada setiap tahunnya;

- c. Adanya penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel;
- d. Adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

- a. Masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan inovasi;
- b. Pengetahuan dan pemahaman ASN terkait inovasi masih sangat rendah;
- c. Kurangnya pelaksanaan lomba/kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Alternatif solusi yang dilakukan pencapaian sasaran terciptanya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain:

- Inovasi dimasukkan dalam program dan anggaran instansi
- Menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi
- Memahami bahwa inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi;
- Membentuk tim inovasi daerah;
- Sosialisasi dengan dunia pendidikan sehingga dapat memicu perkembangan inovasi dan kreatifitas.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Peningkatan kapasitas aparatur dan memperbanyak kerjasama dengan institusi kelitbangan dan universitas adalah strategi yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya.

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

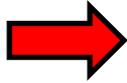
Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain :

➤ Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA),

Program ini diukur melalui indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi melalui kegiatan sosialisasi penerapan inovasi daerah sebanyak 19 OPD (35 orang) dari total 39 opd lingkup pemerintah Kab. Luwu Timur(48,71%). Hal ini sejalan dengan target kinerja sebesar 50 %, sehingga capaiannya sebesar 97,42%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Realisasi anggaran sebesar Rp 33.434.500,- atau 65,56% dari pagu anggaran Rp 50.997.000,-. ini merupakan **kategori sangat tinggi**. Program ini direalisasikan melalui 1 (satu) kegiatan yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.31**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pada Program Sistem Inovasi Daerah**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	0	0	
1	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah inovasi yang dioptimalkan	Kali	1	0	0	Tidak Mencapai Target



**Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

**Tabel 3.32**  
**Analisis pencapaian kinerja sasaran 5**

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	%
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	33,33	25,00	75,00

Pencapaian indikator sasaran ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi} &= \frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan/inovasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan/inovasi dalam Renja perangkat daerah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3}{12} \times 100 \% \\
 &= 25,00 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 75%. Nilai capaian kinerja program ini merupakan kategori sedang. Pada tahun 2020, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) merencanakan menghasilkan 4 dokumen kelitbangan, namun dikarenakan ketua tim dan beberapa anggota Tim terkonfirmasi Positif Covid - 19, sehingga kegiatan ini dari sisi waktu salah satu dokumen kajian tidak dapat

diselesaikan. Adapun dokumen kelitbangan yang diselesaikan yaitu evaluasi kinerja pelayanan public pemerintah kabupaten luwu timur, masterplan rencana induk pariwisata dan dokumen KLHS dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.33**  
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun sebelumnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/ inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	25,00	16,67	16,67

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun- tahun sebelumnya

**c. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra (2016-2021)**

**Tabel 3.34**  
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Akhir Renstra

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Target Akhir Renstra (2020)	Realisasi 2020	%
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/ inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi	%	33.33	25,00	75,00

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah sampai tahun 2020 belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-

upaya yang lebih konkrit oleh tim kelitbangan daerah Kab. Luwu Timur agar capaian kinerja sampai akhir renstra dapat dimaksimalkan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan**

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah antara lain :

- Tim Kelitbangan Daerah Kab. Luwu Timur belum berfungsi maksimal;
- Kurangnya koordinasi dan rapat-rapat teknis terkait kelitbangan/inovasi daerah;

Alternatif solusi yang dilakukan pencapaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian (universitas) serta instansi kelitbangan Kab/Kota;
- Mengadakan pertemuan kelitbangan/inovasi daerah secara berkala.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Peningkatan kapasitas aparatur dan mempebanyak dengan lembaga penelitian (universitas) serta instansi kelitbangan Kab/Kota adalah strategi dalam rangka Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan/inovasi daerah antara lain :

➤ Program Penelitian dan Pengembangan,

Program ini diukur melalui indikator jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan daerah. Realisasi kinerja tahun 2020 sebanyak 1 rekomendasi (50%). Nilai capaian kinerja program ini merupakan **kategori sangat berhasil**. Realisasi anggaran sebesar Rp116.357.000,- atau 35,93% dari pagu anggaran Rp 323.822.000,- ini merupakan **kategori sangat berhasil**. Program ini direalisasikan melalui 3 (tiga) kegiatan yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.35**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja					Ket
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan daerah</b>	%	50			
1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi litbang daerah	Laporan	4	4	100.00	Mencapai Target
2	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan infrastruktur	Laporan	1	0	0.00	Tidak Mencapai Target
3	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya	Laporan	1	1	100.00	Mencapai Target

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sampai triwulan ke-4 tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.306.109.452,- atau 91,20% dari total anggaran sebesar Rp 6.914.3030.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.36**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)
I	Belanja Tidak Langsung	3,512,689,900	3,348,366,291	95.32
	Gaji dan Tunjangan	1,957,633,900	1,886,962,691	96.39
	Tambahan Penghasilan Lainnya	1,555,056,000	1,461,403,600	93.98

II	Belanja Langsung	3,401,614,000	2,957,743,161	86.95
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	686,413,000	622,593,901	90.70
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,935,000	2,927,000	99.73
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,040,000	48,426,101	86.41
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28,564,000	28,560,500	99.99
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17,250,000	14,450,000	83.77
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,594,000	15,575,000	99.88
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,205,000	10,622,600	69.86
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	5,365,000	3,530,000	65.80
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,050,000	10,632,500	70.65
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,240,000	6,120,000	98.08
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,840,000	3,074,000	80.05
11	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	312,660,000	303,903,800	97.20
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	152,000,000	147,000,000	96.71
13	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	55,670,000	27,772,400	49.89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,380,000	68,762,960	82.47
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	44,380,000	43,603,000	98.25
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	39,000,000	25,159,960	64.51
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,180,000	77,886,000	97.14
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	80,180,000	77,886,000	97.14
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	7,390,000	6,525,500	88.30
17	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5,430,000	4,565,500	84.08
18	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	1,960,000	1,960,000	100.00
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4,320,000	3,711,300	85.91
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4,320,000	3,711,300	85.91
6	Program Pengembangan Data/Informasi	65,153,000	61,902,900	95.01
20	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	53,959,000	52,548,900	97.39

21	Penyusunan, Updating, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11,194,000	9,354,000	83.56
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	775,556,000	721,378,500	93.01
22	Penyusunan Rancangan RPJMD	367,700,000	339,278,000	92.27
22	Penyusunan Rancangan RKPD	156,010,000	152,945,000	98.04
23	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	86,845,000	84,804,000	97.65
24	Penyusunan Rancangan KUA PPAS	62,230,000	55,105,000	88.55
25	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	49,730,000	48,975,000	98.48
26	Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	53,041,000	40,271,500	75.93
8	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	289,748,000	282,653,000	97.55
27	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	51,763,000	48,007,200	92.74
28	Rural Empowerment and Agriculture-Scaling Up Initiative (READ-SI)	21,060,000	20,820,000	98.86
29	Koordinasi Investasi Promosi	520,000	520,000	100.00
30	Koordinasi Pengembangan Produk Komoditi Unggulan	29,570,000	29,090,000	98.38
31	Penyusunan Regulasi Pembangunan Ekonomi Daerah	180,305,000	178,581,800	99.04
32	Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	6,530,000	5,634,000	86.28
9	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	254,885,000	233,678,700	91.68
33	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	40,730,000	36,113,000	88.66
34	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	115,023,000	108,323,500	94.18
35	Penyelenggaraan Musrenbang Anak	56,230,000	55,839,200	99.30
36	Koordinasi Forum Pembinaan Kabupaten Sehat	23,152,000	14,913,000	64.41
37	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender	19,750,000	18,490,000	93.62
10	Program Penelitian dan Pengembangan	323,822,000	116,357,000	35.93
38	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	53,883,000	39,258,000	72.86
39	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	211,119,000	23,359,000	11.06
40	Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	58,820,000	53,740,000	91.36
11	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	107,276,000	106,260,900	99.05
41	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	65,590,000	64,584,900	98.47

42	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	41,686,000	41,676,000	99.98
12	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	672,494,000	622,598,000	92.58
43	Koordinasi Penanganan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	35,000,000	22,138,000	63.25
44	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah	44,650,000	42,306,000	94.75
45	Koordinasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	15,516,000	8,937,000	57.60
46	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah	15,000,000	12,260,000	81.73
47	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	562,328,000	536,957,000	95.49
13	Program Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	50,997,000	33,434,500	65.56
48	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	50,997,000	33,434,500	65.56

# BAB IV

## PENUTUP

**P**enyusunan Laporan Kinerja sampai triwulan IV Tahun 2019 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kab. Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan evaluasi program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi “Luwu Timur Terkemuka 2021”. Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki guna mewujudkan cita-cita sesuai Visi “Luwu Timur Terkemuka 2021”.

